



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN, DAN KOSMETIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMELDA ESTER RIANA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 676227

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 43 m2/43 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 794.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 CVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X MAX BG6 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.



1.500.000

5. MOTOR, VESPA PIAGGIO GTS 150 3V IE A/T Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 11.000.0006. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E CTV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
215.000.0007. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 420.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 71.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 197.139.416

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.693.139.416

III. HUTANG

Rp. 199.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.493.739.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.